

Judul : Kasus Taufik Dikembangkan
Tanggal : Senin, 05 November 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Kasus Taufik Dikembangkan

Partai Amanat Nasional, pekan ini, akan membahas reposisi Taufik Kurniawan dari berbagai jabatan yang diembannya, termasuk sebagai Wakil Ketua DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengembangkan penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau *fee* yang melibatkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. KPK pun mempersilakan jika Taufik bersedia membuka peran-peran atau adanya aliran dana ke pihak lain dalam kasus tersebut.

Taufik ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima imbalan uang Rp 3,65 miliar saat mengurus dana alokasi khusus (DAK) fisik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 untuk APBD-P Kabupaten Kebumen 2016. Pada Jumat (2/11/2018), Taufik secara resmi ditahan oleh KPK.

"Sejauh ini, bukti yang kami miliki terkait dugaan aliran dana-nya adalah salah satunya terhadap TK. Kalau memang tersangka ingin membuka ada peran pihak lain, silakan saja karena proses anggaran pembahasan ini tak mungkin dilakukan oleh satu orang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (4/11), di Jakarta.

Kasus Taufik bermula dari pendekatan yang dilakukan Bupati Kebumen M Yahya Fuad kepada sejumlah pihak seusia dirinya dilantik pada 2016. Salah satunya adalah Taufik yang merupakan Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan yang membawahkan lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran. Taufik pun membantu pengurusan DAK fisik untuk APBD Perubahan Kabupaten Kebumen tahun 2016 dengan *fee* 5 persen dari total anggaran Rp 73,37 miliar (*Kompas*, 31/10/2018).

Yahya pun telah dihukum empat tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama tiga tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam berkas tuntutan Yahya, jaksa KPK sempat menyebut sejumlah nama anggota DPR lain, yaitu Romahurmuziy, Utut Adianto, Bambang Soesatyo, Darori Ronodipuro, Amelia Anggraini, dan Taufik Abdullah.



KOMPAS/ALIF ICHWAN

Selesai diperiksa selama 10 jam oleh penyidik, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (2/11/2018) malam, di Jakarta. Taufik ditahan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan 2016.

Sebelumnya, Soesatyo, Darori Ronodipuro, Amelia Anggraini, dan Taufik Abdullah.

Febri enggan berspekulasi mengenai penyebutan nama-nama tersebut. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan KPK mengembangkan perkara ini mengingat keterlibatan Taufik didalamnya setelah disebut dalam persidangan.

Reposisi

Sementara itu, Taufik telah

menyatakan diri mundur dari jabatannya di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski demikian, ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan berstatus anggota DPR.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, pernyataan mundur dari BPN Prabowo-Sandiaga disampaikan Taufik secara lisan, pekan lalu. "Beliau memilih fokus menangani kasus hukumnya," kata Eddy.

Meski demikian, Eddy mengatakan, sejauh ini Taufik belum pernah menyampaikan niat apa pun untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR. "Belum, belum sampai ke situ," ujarnya.

Menyusul penahanan Taufik, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional pun berencana mengadakan rapat, pekan ini, untuk membicarakan reposisi Taufik dari berbagai jabatan yang ia emban. Eddy mengatakan, langkah pertama sudah dilaku-

gkan

kan, yaitu menonaktifkan Taufik dari jabatan Wakil Ketua Umum PAN. Reposisi itu tidak harus menunggu Taufik berstatus terdakwa kasus korupsi.

Sementara langkah berikutnya, mencopot Taufik dari jabatan pimpinan DPR dan status keanggotaan di DPR. "Kami akan segera menjalankan proses melakukakan reposisi. Namun, proses itu harus menunggu Pak Zulkifli (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) kembali dari luar negeri," kata Eddy.

Menurut rencana, Zulkifli kembali pada Selasa (6/11) mendatang.

Eddy menampik kabar bahwa calon pengganti Taufik sudah mengerucut ke dua elite PAN, yaitu Wakil Ketua Umum PAN dan putra Amien Rais, Hanafi Rais, serta Waketum PAN dan Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap. Menurut dia, saat ini DPP masih menyusuri nama 48 anggota Fraksi PAN di DPR untuk mencari pengganti yang terbaik.

"Saya tidak mau berspekulasi nama itu dari mana, saya tidak bisa mengonfirmasi hal itu karena proses pembicaraan teknis juga belum kami jalankan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, akhir-akhir ini secara informal muncul usulan terkait sosok elite PAN yang bisa menggantikan posisi Taufik sebagai pimpinan DPR. Nama itu mengerucut pada Hanafi Rais dan Mulfachri Harahap.

Wakil Bendahara Umum PAN Asri Anas bahkan mengatakan, rapat harian DPP PAN, Rabu (31/10) malam, telah merekomendasikan Hanafi untuk menggantikan Taufik (*Kompas*, 1/11/2018).

Eddy mengatakan, kriteria utama pengganti Taufik adalah sosok senior di partai dan DPR. Faktor kedua, komitmen pada partai dan koalisi pemenang Prabowo-Sandiaga. (AGE/IAN)